

ANALISIS PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA PT. WANG KONSTRUKSI INDONESIA

Claudia Lavenia Supit

Program Manajemen Bisnis, Program Studi Manajemen, Universitas Kristen Petra

Jl. Siwalankerto 121-131, Surabaya

E-mail: claudiaa_lavenia@yahoo.com

Abstrak— Implementasi prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) menjadi suatu poin yang penting bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk mampu bertahan dan bertumbuh sekaligus untuk menumbuhkan kepercayaan dan keberlanjutan. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan prinsip-prinsip GCG pada PT Wang Konstruksi Indonesia. Penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa perusahaan telah mengimplementasikan prinsip-prinsip Good Corporate Governance, hanya saja belum sempurna seluruhnya, perbaikan perlu dilakukan lebih lanjut terutama prinsip Transparansi, Akuntabilitas, serta kewajaran dan kesetaraan.

Kata kunci- Good Corporate Governance, Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, Fairness.

I. PENDAHULUAN

Industri bidang konstruksi berkontribusi besar terhadap proses pembangunan di Indonesia. Pertumbuhan industri ini di Indonesia diproyeksikan tumbuh 14,26 persen dan memiliki peran yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi negara (*Metrovnews.com, 2015*). Sektor ini merupakan penyedia pekerjaan, bahan bangunan dan proses konstruksi, serta juga memiliki dampak terhadap kesehatan dan keselamatan tan pekerja konstruksi dan orang-orang yang tinggal dan bekerja di bangunan. Selain itu sektor ini mempengaruhi hampir setiap sektor ekonomi, mulai dari bangunan prasarana seperti jalan hingga bangunan perumahan, sekolah, bendungan dan pekerjaan konstruksi lainnya. Menurut data yang disampaikan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, mengatakan Indonesia merupakan pasar konstruksi terbesar di ASEAN, yang memberikan kontribusi lebih dari 67% terhadap pasar konstruksi ASEAN (*Industri.bisnis.com, 2015*).

Pergerakan ekonomi di sektor ini juga terlihat sangat menjanjikan dengan adanya kebutuhan yang tak terbatas dilihat dari pertumbuhan penduduk Indonesia sendiri, yaitu dengan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai lebih dari 250 juta jiwa hingga saat ini, maka hal tersebut tentunya mengakibatkan pesatnya pembangunan beberapa tahun terakhir. (*bps.go.id, 2016*). Pesatnya pembangunan di Indonesia membuat terbukanya pasar global, hal ini tentunya membuat persaingan menjadi ketat antara kontraktor asing dan kontraktor dalam negeri, ditandai juga dengan seiring pemberlakuan skema pasar bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) di akhir 2015.

Sebuah perusahaan yang memiliki tata kelola yang baik (*Good Governance*) akan sedikit lebih mudah melewati sulitnya dunia persaingan sekarang ini. Tidak hanya memperkuat keuangan dan seluruh aspek internal, perusahaan harus mampu mempertanggungjawabkan semua keputusan dan kebijakan yang diambil kepada masyarakat

sosial. Dengan keadaan ekonomi yang memburuk, masyarakat seringkali mengawasi kinerja perusahaan dan masyarakat menjadi teliti dan ingin tahu bagaimana sebuah perusahaan berjalan. Hal ini terjadi karena masyarakat percaya bahwa perputaran uang yang mempengaruhi jalannya ekonomi banyak dikendalikan oleh perusahaan-perusahaan.

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* sangat dibutuhkan untuk menjaga kelangsungan hidup sebuah perusahaan. Menurut KNKG dalam Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia 2006, pelaksanaan ini didasarkan atas lima prinsip: *transparency* (transparansi), *accountability* (akuntabilitas), *responsibility* (responsibilitas), *independency* (independensi), serta *fairness* (kewajaran atau kesetaraan). Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam menjalani dinamika bisnis sekarang ini, kelima pondasi tersebut menjadi penting untuk mendukung performa perusahaan. Dengan menerapkannya secara konsisten, kondisi perusahaan menjadi sehat, pasar yang baik tercipta dengan memiliki kepercayaan yang tinggi, dan mampu memberikan keuntungan bagi semua pemangku kepentingan.

Penelitian dari Mudashiru, Bakare, Ishmael (2014) juga menunjukkan hal yang sama, bahwa penerapan *good corporate governance* mempunyai dampak positif bagi performa perusahaan. Ditemukan dalam penelitian itu bahwa *good corporate governance* meningkatkan transparansi operasi perusahaan, memastikan akuntabilitas meningkatkan *profitability* perusahaan, serta melin-dungi kepentingan pemegang saham dengan menyelaraskan kepentingannya dengan manajer.

Laporan tentang peringkat dalam penerapan *corporate governance* di Asia oleh *Asian Corporate Governance Association* pada tahun 2012 menem-pat-kan Indonesia di urutan terbawah dengan skor 22 untuk masalah penegakan hukum, skor 35 untuk praktik dan aturan terkait corporate governance, skor 33 untuk kondisi politik dan regulasi yang ada, skor 62 untuk independensi audit dan pencatatan akuntansi, skor 33 untuk budaya corporate governance, dan dengan total skor 37. Hampir dalam semua bidang Indonesia mendapatkan skor terendah sehingga menempatkan Indo-ne-sia di jajaran bawah dalam penerapan corporate governance di antara negara-negara lain yang sedang tumbuh di Asia.

Dalam penelitian ini PT. Wang Konstruksi Indonesia digunakan sebagai subjek penelitian. PT. Wang Konstruksi Indonesia merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi dan dibangun pada tahun 2010 PT. Wang Konstruksi Indonesia adalah perusahaan yang berada di jalan Mayjend Sungkono Ruko Darmo Galeria, kota Surabaya, Jawa timur. Layanan yang ditawarkan oleh PT. Wang Konstruksi Indonesia yaitu pembangunandermaga,pembangunan bandara udara,

pembangunan jalan dan jembatan, pembangunan gedung, dan pengerukan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada, penulis merumuskan permasalahan adalah :

Bagaimana penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yaitu *Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, and Fairness* di PT. Wang Konstruksi Indonesia ?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah:

Menganalisis bagaimana penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam kaitannya dengan *stakeholders* di PT Wang Konstruksi Indonesia sejauh ini.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), *Good Corporate Governance* (GCG) adalah salah satu pilar dari sistem ekonomi pasar. *Penerapan Good Corporate Governance* (GCG) mendorong terciptanya persaingan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif (KNKG p. i). Oleh karena itu penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia sangat penting untuk menunjang pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang berkesinambungan.

Cadbury Committe mendefinisikan Corporate Governance sebagai sistem yang berfungsi untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada para shareholders khususnya, dan stakeholders pada umumnya. Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), asas-asas GCG dijabarkan sebagai berikut(2006,p.5-7):

1. Transparansi (*Transparency*)

Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan kan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

3. Responsibilitas (*Responsibility*)

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

4. Independensi (*Independency*)

Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan

harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

5. Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas

kewajaran dan kesetaraan.

Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*)

Menurut KNKG (2006), pemangku kepentingan adalah mereka yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan dan mereka yang terpengaruh secara langsung oleh keputusan strategis dan operasional perusahaan, yang antara lain terdiri dari pemegang saham, karyawan, mitra bisnis, dan masyarakat terutama sekitar tempat usaha perusahaan. Antara perusahaan dengan pemangku kepentingan harus terjalin hubungan yang sesuai dengan asas kewajaran dan kesetaraan (*fairness*) berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi masing-masing pihak.

Berikut penjelasan siapa saja yang merupakan stakeholders perusahaan menurut KNKG (2006):

1. Pemegang saham

Pemegang saham (*shareholders*) sebagai pemilik modal, memiliki hak dan tanggung jawab atas perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perusahaan. Pemegang saham harus menyadari bahwa dalam melaksanakan hak dan tanggung jawabnya juga perlu memperhatikan kelangsungan hidup perusahaan. Hak pemegang saham pada dasarnya meliputi:

- a. Hak untuk menghadiri, menyampaikan pendapat, dan memberikan suara dalam RUPS berdasarkan ketentuan satu saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan satu suara
- b. Hak untuk memperoleh informasi mengenai perusahaan secara tepat waktu, benar dan teratur, kecuali hal-hal yang bersifat rahasia, sehingga memungkinkan pemegang saham membuat keputusan mengenai investasinya dalam perusahaan berdasarkan informasi yang akurat
- c. Hak untuk menerima bagian dari keuntungan perusahaan yang diperuntukkan bagi pemegang saham dalam bentuk dividen dan pembagian keuntungan lainnya, sebanding dengan jumlah saham yang dimilikinya
- d. Hak untuk memperoleh penjelasan lengkap dan informasi yang akurat mengenai prosedur yang harus dipenuhi berkenaan dengan penyelenggaraan RUPS agar pemegang saham dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, termasuk keputusan mengenai hal-hal yang mempengaruhi eksistensi perusahaan dan hak pemegang saham
- e. Setiap pemegang saham berhak mengeluarkan suara sesuai dengan jenis, klasifikasi dan jumlah saham yang dimiliki, serta setiap pemegang saham berhak untuk diperlakukan setara berdasarkan jenis dan klasifikasi saham yang dimilikinya.

Selain mempunyai hak, pemegang saham juga harus menyadari tanggung jawabnya, meliputi:

- a. Pemegang saham pengendali harus dapat memperhatikan kepentingan pemegang saham minoritas dan pemangku kepentingan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan

- b. Pemegang saham minoritas bertanggungjawab untuk menggunakan haknya dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar
- c. Pemegang saham harus dapat memisahkan kepemilikan harta perusahaan dengan kepemilikan harta pribadi dan memisahkan fungsinya sebagai pemegang saham dengan fungsinya sebagai anggota Dewan Komisaris atau Direksi
- d. Dalam hal pemegang saham menjadi pemegang saham pengendali pada beberapa perusahaan, perlu diupayakan agar akuntabilitas dan hubungan antar perusahaan dapat dilakukan secara jelas

Selain pemegang saham, sebaliknya perusahaan juga harus menyadari pemenuhan kewajiban kepada pemegang saham, yaitu:

- a. Perusahaan harus melindungi hak pemegang saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perusahaan.
- b. Perusahaan harus menyelenggarakan daftar pemegang saham secara tertib sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
- c. Perusahaan harus menyediakan informasi mengenai perusahaan secara tepat waktu, benar, dan teratur bagi pemegang saham, kecuali hal-hal yang bersifat rahasia.
- d. Perusahaan tidak boleh memihak pada pemegang saham tertentu dengan memberikan informasi yang tidak diungkapkan kepada pemegang saham lainnya. Informasi harus diberikan kepada semua pemegang saham tanpa menghiraukan jenis dan klasifikasi saham yang dimilikinya.
- e. Perusahaan harus dapat memberikan penjelasan lengkap dan informasi yang akurat mengenai penyelenggaraan RUPS.

2. Karyawan

Perusahaan harus menggunakan kemampuan bekerja dan kriteria yang terkait dengan sifat pekerjaan secara taat asas dalam mengambil keputusan mengenai penerimaan karyawan. Penetapan besarnya gaji, keikutsertaan dalam pelatihan, penetapan jenjang karir dan penentuan persyaratan kerja lainnya harus dilakukan secara obyektif, tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender, dan kondisi fisik seseorang, atau keadaan khusus lainnya yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Selain itu, perusahaan harus menjamin terciptanya lingkungan kerja yang kondusif, termasuk kesehatan dan keselamatan kerja agar setiap karyawan dapat bekerja secara kreatif dan produktif.

Perusahaan juga harus memastikan tersedianya informasi yang perlu diketahui oleh karyawan melalui sistem komunikasi yang berjalan baik dan tepat waktu. Perusahaan harus memastikan agar karyawan tidak menggunakan nama, fasilitas, atau hubungan baik perusahaan dengan pihak eksternal untuk kepentingan pribadi. Karyawan serta serikat pekerja yang ada di perusahaan berhak untuk menyampaikan pendapat dan usul mengenai lingkungan kerja dan kesejahteraan karyawan. Karyawan juga berhak melaporkan pelanggaran atas etika bisnis dan pedoman perilaku, serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perusahaan.

3. Mitra bisnis

Mitra bisnis adalah pemasok, distributor, kreditur, debitur, dan pihak lainnya yang melakukan transaksi usaha dengan perusahaan. Mitra bisnis berhak memperoleh informasi yang relevan sesuai hubungan bisnis dengan

perusahaan sehingga masing-masing pihak dapat membuat keputusan atas dasar pertimbangan yang adil dan wajar. Selain itu perusahaan harus memiliki peraturan yang dapat menjamin dilaksanakannya hak dan kewajiban mitra bisnis sesuai dengan perjanjian dan peraturan perundang-undangan. Perusahaan dan mitra bisnis juga berkewajiban untuk merahasiakan informasi dan melindungi kepentingan masing-masing pihak kecuali dipersyaratkan lain oleh peraturan perundang-undangan.

4. Masyarakat serta pengguna produk dan jasa

Perusahaan harus memiliki peraturan yang dapat menjamin terjaganya keselarasan hubungan antara perusahaan dengan masyarakat sekitar, termasuk penerapan program kemitraan dan bina lingkungan. Perusahaan juga bertanggungjawab atas kualitas produk dan jasa yang dihasilkan serta dampak negatif terhadap dan keselamatan pengguna. Selain itu perusahaan bertanggungjawab atas dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan di mana perusahaan beroperasi. Oleh karena itu, perusahaan harus menyampaikan informasi kepada masyarakat yang dapat terkena dampak kegiatan perusahaan.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dalam menganalisis data. Menurut Sugiyono (2008), penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Dalam penelitian kualitatif, peneliti itu sendiri yang bertindak sebagai instrumen penelitiannya yang mana sebagai instrumen penelitian harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas, sehingga mampu bertanya, menganalisis, memotret, dan mengkonstruksi situasi sosial yang diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna.

Dalam penelitian ini peneliti harus menampilkan hasil yang sesungguhnya tanpa adanya manipulasi pada saat melakukan penelitian, dan juga setelah melakukan penelitian. Setiap poin dalam penelitian bisa saja menjadi poin utama yang akan terus berkaitan dengan hal-hal lainnya. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah PT. Wang Konstruksi Indonesia yang bergerak dalam bidang konstruksi. Dan dalam penelitian ini objek penelitian adalah implementasi prinsip-prinsip *good corporate governance* pada PT Wang Konstruksi Indonesia.

Jenis data yang dipakai adalah jenis data kualitatif, yaitu :

1. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrument-instrumen yang telah ditetapkan (Purhantara, 2010). Data primer pada penelitian ini diperoleh melalui hasil wawancara dan identifikasi penerapan lima prinsip *Good Corporate Governance* pada perusahaan PT Wang Konstruksi Indonesia.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk sudah jadi (tersedia) publikasi dan informasi yang dikeluarkan dari organisasi atau perusahaan, dan juga bisa

diartikan sebagai sumber data diluar kata-kata dan tindakan yakni sumber tertulis. Lebih lanjut Moleong menjelaskan bahwa data dilihat dari segi sumber tertulis dapat dibagi atas sumber dari buku, majalah ilmiah, dokumen pribadi dan dokumen resmi. (Kotler dan Keller, 2007, p.177) Data sekunder dalam penelitian ini bisa berupa akte pendirian perusahaan, slip gaji, bukti setor pajak, kode etik tertulis, maupun dokumen perusahaan lainnya yang bisa mendukung hasil penelitian.

Teknik penetapan narasumber ini disesuaikan dengan kebutuhan wawancara dalam memilih responden tertentu karena peneliti membutuhkan informasi dari sumber yang paling mengerti dibandingkan dengan narasumber lainnya, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga memudahkan peneliti untuk menggali informasi dari objek atau situasi sosial yang diteliti (Sugiyono, 2014).

Dalam penelitian ini penetapan narasumber menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* yaitu penentuan sampel berdasarkan tujuan tertentu dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Peneliti akan memilih narasumber yang sekiranya memiliki potensi untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam wawancara. Narasumber tersebut adalah jajaran atas di dalam struktur organisasi PT. Wang Konstruksi Indonesia yaitu, pemilik PT. Wang Konstruksi Indonesia, dan manajer PT. Wang Konstruksi Indonesia.

Penelitian ini menggunakan dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan pengumpulan data dengan dokumen. Menurut Suwartono (2014), wawancara adalah "cara menjangkau informasi atau data melalui interaksi verbal / lisan" (p.48). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis wawancara semi terstruktur, di mana dalam pelaksanaannya lebih bebas jika dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Menurut Sugiyono (2010), tujuan dari wawancara semi terstruktur yaitu untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diwawancara diminta pendapat dan ide – idenya, dan peneliti mendengarkan serta mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.

Miles dan Huberman (1984), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh (dalam Sugiyono, 2010, p. 430). Berikut ini adalah langkah – langkah analisis data yang peneliti gunakan.

1. Reduksi Data

Setelah peneliti mendapatkan data – data yang cukup banyak di lapangan, maka peneliti perlu menganalisis melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum dan memilih hal – hal yang pokok serta membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang diperoleh dapat memberikan gambaran yang jelas kepada peneliti. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer untuk memberi kode – kode tertentu sehingga mempermudah peneliti dalam merangkum dan mengambil data pokok yang diperlukan.

2. Penyajian Data

Setelah melakukan reduksi data, peneliti melakukan penyajian data dalam bentuk uraian singkat. Dalam penelitian kualitatif penyajian data yang umumnya digunakan adalah teks yang bersifat naratif. Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan peneliti untuk

memahami apa yang terjadi dan merencanakan pekerjaan selanjutnya yang dapat dilakukan.

3. Verifikasi Data

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berubah jika peneliti menemukan bukti – bukti yang lebih kuat yang mendukung pada pengumpulan data berikutnya. Tetapi jika kesimpulan yang dikemukakan di awal telah didukung oleh bukti yang kuat maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif memungkinkan untuk menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal.

Dalam penelitian kualitatif diperlukan teknik untuk menguji keabsahan data. Pada penelitian ini, triangulasi digunakan untuk menguji kredibilitas data. Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Ada tiga macam teknik triangulasi yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu (Sugiyono, 2010). Triangulasi yang digunakan oleh peneliti adalah triangulasi sumber.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pendiri Perusahaan

Dari awal PT. Wang Konstruksi Indonesia ini didirikan oleh saudara Hadi Prayitno dan saudara Sugiarto, saudara Hadi mengaku bahwa memang memiliki passion dibagian arsitektur meskipun tak memiliki latar belakang arsitektur sebelumnya, selain itu saudara Hadi juga melihat bahwa peluang bisnis di bidang ini cukup menjanjikan untuk kedepannya. PT. Wang Konstruksi Indonesia didirikan pada tahun 2012 tanggal 29 Februari, yang awalnya berada di jalan Mayjend Sungkono Ruko Darmo Galeria, namun ketika sementara dilakukan penelitian, kantor berpindah tempat di Manyar Kertoadi XI kota Surabaya, Jawa timur dikarenakan tempat yang sekarang ditempati lebih baik dari sebelumnya.

Layanan Perusahaan

Layanan yang ditawarkan oleh PT. Wang Konstruksi Indonesia yaitu Pembangunan Dermaga, Pembangunan Bandara Udara, Pembangunan Jalan dan Jembatan, Pembangunan Gedung, dan Pengurukan. Selain itu PT. Wang Konstruksi Indonesia juga menerima pesanan dari konsumen untuk pembangunan ruko, rumah pribadi dan sebagainya.

Jumlah Karyawan

PT Wang Konstruksi Indonesia sendiri memiliki karyawan back office sebanyak 15 orang diluar yang bekerja di lapangan (front office). Karyawan front office memiliki jumlah yang tidak tentu sekitar 100-250 orang dikarenakan jumlah karyawan yang direkrut perusahaan khususnya untuk pekerja lapangan tergantung pada seberapa besar proyek yang didapatkan perusahaan.

Proses Operasional Perusahaan.

PT Wang Konstruksi Indonesia mendapatkan proyek-proyek dengan mengikuti tender-tender dan pelelangan yang pemerintah selenggarakan, kemudian akan diberikan pemberitahuan jika tender yang diikuti menang, setelah itu pengerjaan proyek dilakukan mulai dari perencanaan hingga akhir dari pengerjaan proyek kemudian dipertanggungjawabkan kepada pemerintah. Dari jangkauan pembangunan yang dilakukukan PT Wang Konstruksi Indonesia saat ini baru menjangkau kota Surabaya dan Jakarta, PT Wang Konstruksi Indonesia menyadari betul bahwa persaingan dalam bidang konstruksi memang tidak mudah oleh karena itu PT. Wang Konstruksi Indonesia berusaha memberikan yang terbaik bagi para stakeholder

AGORA Vol.4, No. 2, (2016)

yaitu pemegang saham, karyawan, mitra bisnis, dan masyarakat. Dan berusaha untuk menjadi perusahaan kontraktor nasional yang mampu bersaing dengan perusahaan multinasional lain di era Asean Economic Community 2015.

Penerapan *Good Corporate Governance* pada PT Wang Konstruksi Indonesia.

GCG merupakan suatu sistem yang berfokus pada peningkatan kinerja korporasi melalui pengawasan dari kinerja manajemen dan sekaligus memastikan akuntabilitas manajemen pada pemegang saham dan stakeholders lainnya. Dan untuk mencapai semua itu, penerapan GCG pada perusahaan harus meliputi 5 prinsip, yaitu : *transparency, accountability, responsibility, independency, dan fairness.*

1. *Transparency.*

Dalam penelitian ini penulis meneliti beberapa indikator yang berkaitan dengan bentuk transparansi pada perusahaan PT Wang Konstruksi Indonesia. Ada beberapa indikator dalam penelitian ini yaitu mengenai bentuk penyampaian berbagai informasi, visi dan misi perusahaan, serta kebijakan dalam perusahaan. Transparansi yang dilakukan oleh PT Wang Konstruksi Indonesia sendiri telah ditujukan kepada stakeholdernya yaitu karyawan, pemerintah, konsumen, dan masyarakat sekitar. Bentuk transparansi yang dilakukan oleh PT. Wang Konstruksi dilihat dari penyampaian visi dan misi perusahaan dilihat di hal 39, dimana perusahaan berusaha untuk menyampaikan visi dan misinya lewat gathering yang dilakukan perusahaan dan dihadiri oleh stakeholder PT. Wang Konstruksi, dan dari beberapa karyawan dari PT Wang yang telah wawancarai mengaku telah memahami visi dan misi dari PT. Wang Konstruksi Indonesia namun direktur PT. Wang merasa bahwa belum semuanya menyadari dengan benar visi dan misi dari PT. Wang mengingat bahwa visi dan misi hanya disampaikan beberapa kali ketika awal interview calon karyawan dan saat perusahaan melakukan gathering bersama, selain itu mengingat ada beberapa karyawan juga yang baru bergabung dengan PT. Wang belum lama ini. Pengambilan keputusan atau kebijakan dalam PT. Wang Konstruksi Indonesia cukup transparan, dimana dalam cara mengambil keputusan tidak selalu harus menunggu dan meminta persetujuan dari direktur, melainkan tergantung level masalahnya yang bisa diambil keputusan langsung oleh manager dan bawahannya. Direktur PT. Wang juga mengakui hal tersebut dengan memberikan wewenang masing-masing terhadap bawahannya sesuai jabatan, tugas, dan fungsinya dalam perusahaan, namun tidak berhenti disitu setiap keputusan yang diambil harus dipertanggungjawabkan kepada atasannya.

Penyampaian informasi dalam PT. Wang Konstruksi tidak sepenuhnya terbuka. Hal tersebut terlihat dari adanya perbedaan-perbedaan penyampaian informasi yang diberikan kepada setiap karyawannya. Perbedaan yang terlihat bahwa pihak-pihak tertentu saja yang berkaitan dengan informasi saja yang bisa disampaikan, sedangkan karyawan yang tidak berhubungan dengan informasi, hanya mengetahui mengenai proses operasional perusahaan. Hal itu juga diakui oleh beberapa karyawan bahwa informasi yang disampaikan tergantung dari tugas dan jabatan karyawan tersebut. Namun hal tersebut wajar adanya karena tidak semua bagian informasi yang penting dalam perusahaan harus diberikan kepada setiap karyawan. Menurut Surya & Yustiavanda (2006, p.75 - 76), transparansi informasi tidak bersifat

absolut. Karena tetap ada pembatasan – pembatasan mengenai informasi apa saja yang dapat diberikan. Mengingat pemberian informasi yang berlebihan akan menyebabkan timbulnya kerugian bagi perusahaan. Pembatasan akan dikaitkan dengan 2 hal, yaitu siapa saja yang berhak mengakses informasi dan jenis informasi yang dapat dikeluarkan. Begitu pula terlihat dalam bentuk penyampaian informasi yang diberikan perusahaan PT. Wang Konstruksi Indonesia kepada karyawannya. Sehingga perusahaan tidak serta merta memberikan bagian informasi penting kepada para karyawannya begitu juga dengan stakeholder lainnya. Ada batasan tertentu yang hanya sebagian karyawan berkepentingan yang mengetahui informasi tertentu dalam perusahaan. termasuk laporan keuangan tidak dipublikasikan karena bukan perusahaan go public dan hanya untuk kalangan internal saja.

Mengenai transparansi kepada pemerintah, perusahaan mengaku sudah melaksanakan segalanya dengan sebaik-baiknya. Lagipula, dengan adanya kerja sama dengan pemerintah seperti mengikuti tender dan PL (penunjukan langsung) membuat PT. Wang harus transparan dengan pemerintah mengenai pajak, dan lainnya semua sudah sesuai prosedur yang berlaku dari pemerintah. Terhadap konsumen juga dijelaskan sedemikian detailnya seperti anggaran yang dikeluarkan, bahan material apa saja yang digunakan dan informasi lain yang dibutuhkan oleh konsumen.

Penyampaian informasi perusahaan lewat publik, dan media sosial juga belum cukup transparan tapi penyampaian lewat media sosial berusaha digunakan oleh PT. Wang Konstruksi, dengan adanya website perusahaan yaitu www.wangkonstruksiindonesia.co.id memperlihatkan bahwa PT. Wang berusaha memberikan informasi lewat media sosial. Bisa dilihat beberapa contoh isi website dalam lampiran 8, Informasi yang terdapat di website perusahaan tersebut meliputi company profile, contoh produk yang dihasilkan, lowongan pekerjaan, visi dan misi perusahaan dan beberapa contoh proyek yang telah dikerjakan oleh perusahaan, akan tetapi perusahaan juga mengakui bahwa website yang dimiliki perusahaan belum dimanfaatkan secara maksimal dan tidak diperbarui secara berkala terlihat bahwa sudah beberapa bulan website perusahaan belum di update kembali. PT. Wang. Pameran dagang dan open house juga belum pernah diikuti oleh PT. Wang. Perusahaan mengingat kembali perusahaan masih fokus ke pemerintah dan bukan swasta.

PT. Wang Konstruksi tidak melakukan RUPS dan hanya melakukan rapat bersama dengan karyawan dan pemegang saham lainnya sebulan sekali saja untuk membicarakan perkembangan proyek yang sedang dijalankan dan perkembangan perusahaan yang terjadi, tapi tidak terlalu terpaku dengan jadwal yang resmi, sedangkan dengan pemegang saham direktur utama memilih untuk menyampaikan secara langsung tanpa harus dijadwalkan rapat mengingat juga bahwa dalam perusahaan PT. Wang Direktur utama kantornya seruangan dengan pemegang saham yang lain, direktur juga merasa belum perlu untuk membuat jadwal yang terlalu resmi dikarenakan perusahaan juga belum memiliki struktur organisasi yang kompleks. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa perusahaan akan terus berusaha mengembangkan bisnisnya ke arah yang lebih baik.

2. *Accountability*

Perusahaan harus dikelola secara benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan

AGORA Vol.4, No. 2, (2016)

pemangku kepentingan lainnya. Salah satunya adalah dengan adanya kejelasan mengenai struktur serta rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan.

Struktur organisasi di PT Wang Konstruksi Indonesia jabatan tertinggi adalah Direktur Utama yang kemudian membawahi langsung divisi *accounting* dan *finance*, manager project, manager business development dan manager marketing. Komisaris Utama tidak membawahi divisi apapun karena hanya merupakan pemegang saham pasif. Namun struktur tersebut tidak sesuai dengan UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dimana dalam peraturan tersebut di atas dewan direksi dan komisaris adalah RUPS, sedangkan di PT. Wang Konstruksi Indonesia jabatan tertinggi adalah Direktur Utama dan tidak ada RUPS. Struktur organisasi dari PT. Wang dapat dilihat pada hal 47.

Para Direktur, Komisaris dan pemegang jabatan lainnya dalam perusahaan memiliki fungsi masing-masing dalam struktur perusahaan. Masing-masing memegang peranan penting dan tugas demi kelangsungan hidup dan kemajuan perusahaan kedepannya. Pada PT Wang, struktur tersebut sudah berjalan sesuai dengan fungsinya, masing-masing divisi atau pemegang jabatan bertanggung jawab dengan tugasnya. Akan tetapi menurut hasil wawancara, beberapa jabatan di perusahaan dibuat multifungsi yaitu ada beberapa pekerjaan yang masih dirangkap. Misalnya divisi marketing bisa merangkap ke bagian *accounting* atau *logistic*, hal itu bisa terjadi ketika satu divisi yang pekerjaannya tidak terlalu banya di dibandingkan yang lain, jadi berusaha membantu divisi yang lain.

Sistem pertanggung jawaban adalah berupa laporan-laporan yang dilaporkan kepada atasan di setiap divisi untuk dipertanggungjawabkan nantinya, selain itu juga perusahaan menerapkan sistem reward and punishment kepada setiap karyawannya. Akan tetapi penerapannya tidak terlalu ketat, terutama pemberian hukuman atas terjadinya pelanggaran. Hal ini dilakukan karena perusahaan ingin menciptakan iklim yang nyaman bagi para pekerjanya dan tidak asal main hukum selama kesalahan yang dilakukan masih dalam batas toleransi perusahaan. Oleh karena itu kesadaran masing-masing pihak sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari perusahaan. hukuman yang diberikan awalnya berupa teguran lisan dan dilihat dari masalah yang disebabkan apa, jika sudah kearah yang cukup besar akan diberikan surat peringatan. Pemberian reward karena munculnya prestasi dilakukan dengan memberi bonus atau insentif kepada karyawan. Menanggapi setiap rencana pengembangan perusahaan, seluruh jajaran selalu setuju untuk melakukan yang terbaik karena mereka menganggap karir mereka juga tergantung dari karir perusahaan.

Kode etik yang tertulis tidak dimiliki oleh perusahaan dan salah satu contoh kode etik yang disampaikan adalah cara berpakaian dalam perusahaan yang mengharuskan memakai kemeja dan celana panjang bagi pria dan wanita bisa menggunakan kemeja, rok atau celana panjang, kode etik hanya disampaikan secara lisan oleh atasan disaat awal penerimaan calon karyawan. direktur percaya bahwa seluruh jajaran memiliki etika yang baik dalam melaksanakan tanggung jawabnya dan hanya perlu dijelaskan pada awal saja dan pasti lama-kelamaan setiap karyawan akan menyadari kode etik yang ada dalam perusahaan dengan baik.

3. Responsibility

Responsibilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban perusahaan yang berupa kepatuhan perusahaan terhadap hukum dan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang. Dalam penerapan prinsip ini, PT Wang Konstruksi Indonesia sudah menjalankan operasional perusahaan sesuai dengan peraturan pemerintah mengenai standar umum sebuah perusahaan. Salah satu contohnya adalah jam kerja perusahaan yang sudah sesuai dengan pasal 77 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003 mengenai ketentuan jam kerja. Jam kerja PT Wang Konstruksi Indonesia adalah 7 jam kerja dalam 1 hari untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu. Senin s/d Jumat: pk 08.00-pk 16.00 WIB, sedangkan hari Sabtu mulai pk 08.00-pk 13.00 WIB.

Layanan yang dihasilkan oleh PT Wang Konstruksi Indonesia ini tidak menghasilkan limbah karena perusahaan dibidang konstruksi dimana perusahaan hanya membangun bangunan yang siap pakai, dan tidak memberikan dampak buruk bagi lingkungan sekitar. Direktur PT. Wang bahkan bersedia memberikan sisa-sisa bahan dari proyek yang masih layak digunakan kembali dan diberikan kepada masyarakat sekitar yang membutuhkan, contohnya semen sisa ataupun keramik-keramik sisa. Jadi untuk tanggung jawab perusahaan kepada lingkungan sekitar sudah sesuai dengan peraturan pemerintah mengenai limbah perusahaan yaitu UU Nomor 32 Tahun 2009 mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Untuk tanggung jawab perusahaan terhadap para karyawan, PT Wang Konstruksi Indonesia sudah mengikutkan seluruh karyawan baik dari bagian back office dan front office demi kesejahteraan mereka kedalam asuransi jiwa dan kesehatan milik swasta yang menurut direktur lebih bagus dibandingkan punya pemerintah. Tapi sistem yang agak berbeda untuk front office yang bekerja langsung dengan lapangan perusahaan mengikutkan asuransi tersebut hanya dalam jangka waktu selama proyek dalam kontrak yang telah disetujui bersama antara karyawan dan perusahaan. Selain itu, perusahaan juga memberi bonus kepada para karyawan dengan mengikuti peraturan pemerintah yaitu minimum satu bulan gaji. Bonus tersebut bisa naik diukur dari prestasi karyawan dan masa kerja karyawan. Terkait upah minimum, dua dari tiga narasumber mengatakan bahwa PT Wang telah mematuhi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 89 – 90 terkait pembayaran upah minimum kepada seluruh jajaran karyawan di posisi jabatan manapun. Namun salah satu narasumber yaitu direktur PT. Wang sendiri mengatakan bahwa ada beberapa karyawan yang gajinya belum mengikuti UMR yang berlaku dan bersifat negosiasi ketika di awal pekerjaan. Hal ini dilakukan oleh perusahaan untuk melihat kinerja dari karyawannya yang dirasa belum memiliki tanggung jawab yang besar seperti yang lain. Namun apabila dirasa sudah pantas perusahaan pasti memberikan gaji sesuai UMR yang berlaku. Menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 68, 72, dan 74 mengenai pekerja anak, PT Wang Konstruksi Indonesia tidak mempekerjakan anak di bawah 17 tahun. Pekerja paling muda di perusahaan berumur 19 tahun yang dijadikan pekerja kasar di proyek. Alasan perusahaan tidak mau mempekerjakan anak adalah karena pekerjaan yang dilakukan di lapangan cukup berat dan berisiko bagi anak yang belum dewasa.

Menyangkut pemberian cuti kepada karyawan, perusahaan tidak terlalu memusingkan adanya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 79 karena perusahaan selalu

membebaskan karyawan untuk ijin dengan alasan apapun. Sampai sejauh ini perusahaan juga tidak pernah mengalami kesulitan dengan penerapan kebijakan yang seperti itu. Bahkan dalam bulan ramadhan perusahaan memberikan toleransi jam kerja bagi karyawannya.

4. *Independency*

Independency yaitu suatu keadaan perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

Pemegang saham dan karyawan yang ada dalam PT. Wang Konstruksi Indonesia mengakui bahwa intervensi yang terjadi dalam perusahaan cenderung lebih ke arah masukan dan itu dikembalikan pada setiap jabatan yang menerima masukan tersebut jika pemegang saham atau karyawan merasa saran tersebut dapat diterima tentunya akan dilakukan perbaikan, tetapi jika tidak diperlukan setiap karyawan dan pemegang saham bisa mengabaikan masukan tersebut dan bisa tetap mempertahankan apa yang diyakini terbaik untuk perusahaan. Pada intinya perusahaan tidak pernah mengalami intervensi dari pihak manapun. Perusahaan berusaha menghindari adanya dominansi dan benturan kepentingan dengan cara memperjelas kembali apa saja tugas dan proporsi tanggung jawab masing-masing organ. Ditambah dengan ketertiban dan ketaatan masing-masing anggota perusahaan pada ketetapan yang sudah diatur, PT Wang Konstruksi Indonesia berhasil mengelola jalannya perusahaan dengan sebagaimana mestinya. Sejauh ini direktur perusahaan juga sudah cukup objektif dalam pengambilan keputusan. Hal ini tercapai seiring berjalannya waktu dan adanya masukan-masukan yang ditujukan kepada direktur.

Dalam pengambilan keputusan perusahaan PT Wang Konstruksi Indonesia tidak menetapkan pola pengambilan keputusan, karena keputusan dapat terjadi topdown ataupun bottom up. Jika keputusan berasal dari atas maka keputusan itu dibagikan dengan level dibawahnya sesuai keputusan dari top management. Sedangkan untuk keputusan dari bawah lebih seperti usulan yang akan dipertimbangkan dan disampaikan secara bertahap sampai ke atas, namun keputusan akhirnya tetap pada top management. Perusahaan lebih menekankan bahwa keputusan dapat diambil dari mana saja sesuai dengan kepentingannya. Jika sampai pada suatu kebijakan yang berpengaruh besar pada perusahaan maka keputusan akhirnya tetap pada top management. Setiap divisi dalam perusahaan diberikan wewenang untuk dapat mengambil keputusan namun wewenang tersebut bersifat terbatas, hanya keputusan-keputusan yang bersifat operasional perusahaan saja. Kemandirian perusahaan masih tergantung oleh keputusan-keputusan sesuai dengan seberapa besar kepentingan tersebut. Jika kepentingan tersebut menyangkut strategi perusahaan maka yang berhak memutuskan adalah top management saja, namun untuk segi operasional dan tidak terlalu besar maka dapat dilakukan oleh divisi yang berwenang. Sehingga terlihat bahwa pengambilan keputusan masih bersifat sentralisasi karena

keputusan akhir perusahaan diputuskan oleh top management.

5 *Fairness*

Prinsip *fairness* atau kesetaraan dan kewajaran ini merupakan prinsip yang tidak kalah penting dengan prinsip-prinsip sebelumnya. Perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan.

Dalam penerapan *fairness* pada perusahaan PT Wang Konstruksi Indonesia tidak ada pemberian hak-hak istimewa terhadap salah satu karyawan. Misalnya, semua karyawan diperlakukan secara adil berdasar kontribusi masing-masing orang bagi perusahaan. Selain itu, perusahaan tidak mengistimewakan konsumen tertentu. Semua orang dipandang sama oleh perusahaan. Hal tersebut juga berlaku untuk anggota keluarga dalam perusahaan, sehingga perusahaan lebih menekankan kesetaraan sesuai dengan kemampuan dan profesionalitas kerja.

Semua pihak juga diberikan kesempatan yang sama dalam memberikan kritik maupun saran kepada perusahaan. Hal ini bisa dilakukan secara lisan, melalui formulir, maupun mengirim email kepada perusahaan. Semua saran dan kritik yang diberikan akan diterima dengan baik dan akan dilakukan demi kemajuan perusahaan serta kebaikan bersama.

Tidak semua pemangku kepentingan mendapat kewenangan yang sama untuk mengakses informasi perusahaan. Hanya pihak tertentu dan hanya informasi tertentu yang dapat diakses mengingat kembali apa kepentingan pihak tersebut terhadap perusahaan. Sistem dan kriteria dalam perekrutan karyawan disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat pendidikan sesuai dengan persyaratan tertentu. Terlihat bahwa perusahaan tidak membedakan atau mendiskriminasi golongan tertentu untuk merekrut karyawan, karena yang terpenting adalah sesuai dengan persyaratan dan kemampuan calon karyawan tersebut. Hal tersebut sama halnya dengan ketentuan yang berlaku pada prinsip *fairness* dalam pedoman KNKG (2006), perusahaan harus memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender, dan kondisi fisik.

IV. KESIMPULAN/RINGKASAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis pada PT Wang Konstruksi Indonesia yang dilakukan penulis, maka penulis dapat memberikan kesimpulan dan saran bagi perusahaan dalam hal penerapan *Good Corporate Governance* yang sekiranya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pengelolaan dan kemajuan usaha PT Wang Konstruksi Indonesia sebagai perusahaan konstruksi.

Kesimpulan dari hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Prinsip *Transparency* dalam perusahaan PT Wang Konstruksi Indonesia dilihat dari penyampaian visi dan misi perusahaan secara lisan kepada karyawan namun tidak tertulis. Selain itu pengambilan keputusan atau suatu kebijakan di perusahaan PT Wang Konstruksi Indonesia memberikan kewenangan kepada masing-

masing pihak sesuai levelnya dalam perusahaan dan tidak harus dari *top management* saja. Dalam penyampaian informasi kepada stakeholder, terdapat adanya perbedaan pembagian informasi terutama mengenai laporan keuangan. Hanya bagian *top management* saja yang mengetahui laporan keuangan secara *detail* dalam perusahaan. Pemberian informasi yang berkaitan dengan *stakeholders* seperti pemerintah, mitra bisnis, supplier, dan masyarakat sekitar telah disampaikan sesuai dengan kepentingan dan kebutuhannya sendiri.

2. Prinsip *Accountability* yang dijalankan oleh PT Wang Konstruksi Indonesia masih belum dilaksanakan dengan maksimal. Struktur organisasi dan pembagian *job description* sudah dijalankan, namun terdapat perangkapan tanggung jawab yang dibebankan oleh satu orang yang sama. Hal tersebut terjadi karena perusahaan menginginkan efisiensi dengan peringkasan karyawan. Sedangkan untuk pelaksanaan SOP (*Standard Operating Procedure*) sudah diberikan kepada karyawan dengan jelas, namun kenyataannya terkadang masih ditemukan berbagai macam pelanggaran. Sistem *reward and punishment* sudah diterapkan di perusahaan, meskipun penerapan hukuman tidak terlalu ketat. Penerapan etika bisnis juga sudah dilaksanakan dengan adanya kode etik yang hanya disampaikan secara lisan.
3. Prinsip *Responsibility* dilakukan perusahaan dengan mentaati regulasi dan undang-undang yang berlaku. Perusahaan berusaha berkontribusi dengan masyarakat sekitar lewat bantuan-bantuan yang diberikan dan bertanggung jawab dengan kerusakan yang disebabkan oleh perusahaan. Karyawan di perusahaan juga telah diikutkan dalam asuransi jiwa dan kesehatan, jaminan hari tua dan dana pensiun.
4. Dalam penerapan prinsip *Independency* ini PT Wang Konstruksi Indonesia tidak terlihat adanya intervensi dari pihak luar dan negara. Setiap divisi diberikan wewenang dalam mengambil keputusan, namun kewenangan itu bersifat terbatas. Kemandirian perusahaan dalam mengambil keputusan masih tergantung dari seberapa penting keputusan tersebut. Selain itu untuk segala keputusan yang menyangkut strategi perusahaan hanya pihak *top management* saja yang berhak memutuskannya
5. Dalam penerapan prinsip *Fairness*, PT Wang Konstruksi Indonesia memperlakukan setiap karyawannya dengan setara yang disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki. Sehingga jenjang karir dalam perusahaan berjalan dengan adil sesuai kemampuan yang dimiliki setiap karyawan. Perusahaan telah memberikan hak-hak kepada karyawan sesuai yang harus dimiliki oleh setiap karyawan.

Berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa saran yang dapat diberikan oleh penulis kepada PT Wang Konstruksi Indonesia, yaitu :

1. Struktur organisasi PT Wang Konstruksi Indonesia dapat disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan nomor 40 tahun 2007. Sebaiknya perusahaan dapat mengikuti struktur organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut sehingga perusahaan dapat berjalan dengan baik dan maksimal untuk kedepannya.
2. Sebaiknya perusahaan memberikan *job description* kepada karyawannya secara tertulis dan jelas sehingga

tidak menimbulkan perangkapan tanggung jawab pada satu orang.

3. Dalam pelaksanaan SOP (*Standard Operating Procedure*) di perusahaan jika ada karyawan yang melanggar seharusnya perusahaan dapat bertindak tegas untuk memberikan sanksi, sebelum terjadi hal yang tidak diinginkan. Sejah ini perusahaan hanya memberikan sanksi jika sudah terjadi pelanggaran yang merugikan perusahaan.

Demikian merupakan sebagian kesimpulan dan saran yang berikan oleh penulis kepada perusahaan PT Wang Konstruksi Indonesia, semua saran bersifat dukungan dan tidak ada maksud tertentu untuk menyinggung atau merusak nama baik perusahaan PT Wang Konstruksi Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Asian Corporate Governance Association. (2012). CG Watch 2012: Market Rankings.
- Antara. (2015). Industri konstruksi diproyeksi tumbuh 14,26% Retrieved March 8, 2016. from <http://ekonomi.metrotvnews.com/read/386916/industri-konstruksi-diproyeksi-tumbuh-14-26>.
- Azwar, S. (1998). Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Angkasa Pura II. Tata Kelola Perusahaan. Retrieved April 11, 2016, from <http://www.angkasapura2.co.id/id/tentang/gcg>
- Mudashiru, Bakare, Ishmael (2014). Good Corporate Governance and Organisational Performance: An Empirical Analysis, Corporate Governance, Vol. 14 Iss 1 pp. 120 – 129.
- Anne, G., Peter, W., Katja, R. (2015). A social norm perspective on corporate governance soft law, Corporate Governance, Vol. 15 Iss 1 pp. 31 – 51
- Badan Pusat Statistik. (2015) Jumlah penduduk Indonesia Retrieved March 11 from: <https://www.bps.go.id/Subjek/view/id/12#subjekViewTab3|accordion-daftar-subjek1>
- Bateman, T.S., Snell, S.A. (2009). Management, Leading & Collaborating in the Competitive World. Edisi 10. New York: McGraw-Hill.
- Berkah, Emanuel C. (2015). Ini tantangan pasar jasa konstruksi nasional. Retrieved march 7, 2016. from <http://industri.bisnis.com/read/20150419/45/424543/initantangan-pasar-jasa-konstruksi-nasional>
- BRI. GCG dan Kode Etik BRI. Retrieved April 12, 2016 from <http://www.bri.co.id/articles/165>
- Cadbury Committee Report (1992). The financial aspect of Corporate Governance. Gee and Co.Ltd. London. Retrieved March 14, 2016. from : <http://www.ecgi.org/codes/documents/cadbury.pdf>
- Emmanuel Adegbite, (2012). Corporate governance regulation in Nigeria. Corporate Governance: The international journal of business in society, Vol. 12 Iss 2 pp. 257 – 276
- FCGI. What is Corporate Governance. Jakarta. Retrieved April 12, (2016) from <http://www.fcgi.or.id/corporate-governance/about-good-corporate-governance.html>
- Global Environmental Management Initiative. (2004). Transparency: A Path to Public Trust.
- Harilaos Mertzanis, (2011). The effectiveness of corporate governance policy in Greece", Journal of Financial

- AGORA Vol.4, No. 2, (2016)
Regulation and Compliance, Vol. 19 Iss 3 pp. 222 – 243
- Komite Nasional Kebijakan Governance (2006). Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia. Komite Nasional Kebijakan Governance. Jakarta. Retrieved March 9, (2016), from [http://www.ecgi.org/codes/.../indonesia_cg_2006_id . pdf](http://www.ecgi.org/codes/.../indonesia_cg_2006_id.pdf)
- Marty Stuebs Li Sun . (2015). Corporate governance and social responsibility. *International Journal of Law and Management*, Vol. 57 Iss 1 pp. 38 - 52
- Purhantara, Wahyu. (2010). Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Richard, T., Ana-Maria, P, (2006).Corporate governance, shareholder value and societal expectations. *Corporate Governance: The international journal of business in society*, Vol. 6 Iss 3 pp. 305 – 316
- Syakhroza, Akhmad. (2003). Best practice Corporate Governance Dalam Konteks Kondisi Lokal Perbankan Indonesia, majalah Usahawan Indonesia, No. 06, Vol XXXII, pp 13-20.
- Suwartono. (2014). Dasar – dasar Metodologi Penelitian. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Surya, Indra dan Ivan Yustiavanda. (2006). Penerapan Good Corporate Governance : mengesampingkan hak-hak istimewa demi Kelangsungan Usaha, Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- Sugiyono. (2008). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabet.
- Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Tarek, I., Eldomiaty Chong Ju C. (2006).Corporate governance and strategic transparency: East Asia in the international business systems. *Corporate Governance: The international journal of business in society*, Vol. 6 Iss 3 pp. 281 – 295.
- Umar, Husein. (2000). Business an Introduction. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (PPLH). Retrieved March 8 (2016) from <http://prokum.esdm.go.id/uu/2009/UU%2032%20Tahun%202009%20%28PPLH%29.pdf>
- Undang-undang No. 3 Tahun 1992 tentang JAMSOSTEK. Retrieved March 8 (2016) from http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_1992_3.pdf
- Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Retrieved March 8 (2016) from <http://www.hukumtenagakerja.com/pengupahan-dalam-undang-undang-ketenagakerjaan/>
- Vilcox, Mary., Mohan, Thomas. (2007). Contemporary Issues in Business Ethics. New York: Nova Science Publisher, Inc. from <https://books.google.co.id/books?id=KVxRPC4qr7UC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false>
- Zarkasyi, Moh. Wahyudin. (2008). Good Corporate Governance ; Pada Badan Usaha Manufaktur, perbankan, dan jasa keuangan lainnya. Bandung : Alfabeta.